

02-Rahmat.docx

by

Submission date: 11-Jul-2021 10:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1618183952

File name: 02-Rahmat.docx (361.95K)

Word count: 3787

Character count: 25909



Penguatan Peran Kepemimpinan Kurikulum (*Curriculum Leadership*) Wakil Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kepemimpinan Pembelajaran (*Instructional Leadership*)

Rahmat¹, Dinn Wahyudin²

Nurul Fikri Education Center¹, Universitas Pendidikan Indonesia²

rahmatsyehani@gmail.com

Abstrak

Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana revolusi tersebut akan memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor khususnya tiga klaster: fisik, digital, dan biologi. Dengan kondisi demikian, maka tuntutan perubahan terhadap Lembaga pendidikan menjadi begitu besar. Pendidikan sebagai sebuah upaya mempersiapkan masa depan bangsa harus mampu menjawab tantangan ini. Dengan semakin kompleksnya permasalahan di abad ke-21 seperti dijelaskan di atas dan perlunya kepala sekolah menerapkan kepemimpinan instruksional maka diperlukan sebuah model kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan keduanya untuk menjadi lebih produktif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) di mana peneliti menggunakan berbagai sumber rujukan dan dokumen yang dapat mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kepala sekolah harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat mempengaruhi orang lain salah satu yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum sehingga diperlukan pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi kepemimpinan pembelajaran antara kepala sekolah dengan wakil bidang kurikulum dan dapat terlihat bahwa wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki peranan sangat strategis dalam tata kelola implementasi kurikulum.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan Kurikulum, Kepemimpinan Pembelajaran

Abstract

We are currently in the era of the industrial revolution 4.0, where this revolution will have a very significant impact on various sectors, especially three clusters: physical, digital, and biological. With these conditions, the demands for changes in educational institutions become so great. Education as an effort to prepare the nation's future must be able to answer this challenge. With the increasingly complex problems in the 21st century as described above and the importance of principals implementing instructional leadership, a leadership model is needed that can integrate the two to be more productive. This research uses library research by utilizing various reference sources and documents that can support the research process. In this study, it was found that the principal must have leadership abilities which can influence others, one of which is the vice principal in the curriculum field so that it is necessary to divide the tasks and authority in the implementation of learning leadership between the principal and the vice principal in the curriculum field and it can be seen that the vice principal in the field of curriculum The curriculum has a very strategic role in the governance of curriculum implementation.

Keywords: Curriculum Leadership, Instructional Leadership, Leadership

PENDAHULUAN

Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana industri revolusi pertama hadir sekitar tahun 1760 – 1840, dimulai dengan pembangunan jalur kereta api dan penemuan mesin uap. Revolusi industri kedua dimulai akhir abad ke-19 yang mengakibatkan terjadinya produksi massal di berbagai industri. Revolusi kedua ini dipicu oleh penemuan listrik dan sistem perakitan. Kemudian industri revolusi ketiga dimulai tahun 1960an dengan basis industri komputer. Sebagaimana revolusi industri sebelumnya, IR 4.0 ini akan memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor. Schwab (2016) membagi tren perubahan tersebut dalam tiga klaster: fisik, digital, dan biologi (Schwab, 2016).

Dengan kondisi demikian, maka tuntutan perubahan terhadap Lembaga pendidikan menjadi begitu besar. Salgues (2018) menyebutkan bahwa era revolusi industri 4.0 membawa masyarakat memasuki *society 5.0*, di mana masyarakat 5.0 dirujuk sebagai tipikal masyarakat yang menjadikan inovasi dalam sains dan teknologi sangat menonjol dengan tujuan adanya keseimbangan sosial dan emosional. Dalam masyarakat 5.0 segala permasalahan kemasyarakatan yang muncul dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu dalam waktu bersamaan terus terjadi proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk itulah maka model sekolah yang dikembangkan pada era agraris atau industri berbasis mesin tidak lagi relevan dengan era revolusi industri 4.0 ini. Karena siswa memerlukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika yang sesuai dengan masyarakat 5.0 (Koh, Chai, Wong, & Hong, 2015; Salgues, 2018).

Pendidikan sebagai sebuah upaya mempersiapkan masa depan bangsa harus mampu menjawab tantangan ini. Pendidikan harus mampu berperan dalam meningkatkan prestasi para pembelajar hingga menuju puncak prestasinya (Liu & Low, 2015). Maka diperlukan modifikasi terhadap sistem pendidikan, cara pandang tentang sumber daya manusia & *mindset*-nya, serta keseriusan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Modifikasi perlu dilakukan secara parallel dengan pembelajaran abad ke-21. Proses pendidikan terkait penguasaan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan pemecahan masalah harus menjadi prioritas sekolah dalam setiap aktivitasnya (Carlgren, 2013).

Selanjutnya menurut *World Economic Forum* (WEF) model-model pendidikan yang dikembangkan saat ini adalah produk dari era revolusi industri masa lalu. Ke depan model pendidikan yang dibangun harus meminimalisir potensi ketidaksetaraan, sehingga semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Temuan-temuan di era revolusi industri 4.0 dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut (*World Economic Forum*, 2020). Untuk itulah kemudian maka posisi guru menjadi sangat penting, dan ini banyak disadari oleh lembaga-lembaga pendidikan sehingga dapat kita saksikan Lembaga penyelenggara pendidikan memberikan perhatian tinggi terhadap proses pengembangan guru. Namun, dalam realita di lapangan, sebegus apapun kompetensi guru pada akhirnya sangat tergantung pada kompetensi pemimpinnya, yaitu kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan *law of the lid* dari Maxwell yang mengatakan bahwa kemampuan kepemimpinan menentukan tingkat efektivitas orang-orang yang dipimpinnya (Maxwell, 2007). Misalnya saja, kepala sekolah yang berkualitas akan mampu mengembangkan guru-gurunya sehingga memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memenuhi kebutuhan pendidikan masa depan (Jang, 2015). Namun, jika ada satu guru berkualitas maka hanya dapat dirasakan dan memberikan manfaat sebatas pada kelas dan bidang studi yang diajarkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kepala sekolah memiliki peranan yang sangat vital dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menentukan kualitas lulusan (Grissom, Hajime, & Woo, 2019; Peerone & Tucker, 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan strategisnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi. Pembentukan kebiasaan positif seperti kedisiplinan, motivasi berprestasi, dan bekerja dengan performa tinggi tidak bisa lepas dari peran sentral kepala sekolah. Sehingga bisa dikatakan bahwa kesuksesan sekolah seperti pembentukan budaya berprestasi akan benar-benar terwujud oleh kepala sekolah yang memiliki kemampuan kinerja yang tinggi (Barakat, Reames, & Kensler, 2019). Untuk itulah maka banyak

negara menetapkan standar sebagai jaminan kepastian mutu kepala sekolahnya. Misalnya saja di Australia yang menetapkan tiga lensa kompetensi kepemimpinan sekolah melalui *The Australian Institute for Teaching and School Leadership* (AITSL, 2014) dan penetapan *Professional Standard for Education Leaders 2015* dari *National Policy Board for Educational Administration* di Amerika Serikat (*National Policy Board for Educational Administration*, 2015).

Penelitian untuk terus memperbaiki mutu penyelenggaraan persiapan kepala sekolah terus dilakukan, mulai dari perbaikan standar, keselarasan antara standar dengan implementasi hingga kesesuaian standar dengan kemajuan teknologi yang semakin dinamis (Peerone & Tucker, 2019; Jacobson & Cypres, 2012).

Di Malaysia, proses peningkatan mutu kepala sekolah dilakukan oleh *National Professional Qualification for Education Leaders (NPQEL)*. Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah melibatkan peneliti dan hasilnya program terbaru Pendidikan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Malaysia melalui NPQEL telah berjalan secara baik dalam mempersiapkan calon kepala sekolah (Adams & Mooi, 2020).

Dengan semakin kompleksnya permasalahan di abad ke-21 seperti dijelaskan di atas dan perlunya kepala sekolah menerapkan kepemimpinan instruksional maka diperlukan sebuah model kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan keduanya untuk menjadi lebih produktif. Dengan luasnya peran kepala sekolah di Indonesia mulai dari pendaftaran siswa baru hingga pengurusan gedung, dan pembelajaran, maka membangun tim yang solid dengan memainkan peran masing-masing secara optimal menjadi penting. Untuk kurikulum, sekolah-sekolah di Indonesia memiliki peluang besar bisa terkelola dengan baik. Karena selama ini di Indonesia, setiap sekolah memiliki wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tetapi umumnya peran wakil kepala sekolah baru sebatas administratif, untuk wakil kepala sekolah kurikulum biasanya hanya terfokus pada satu pekerjaan rutin yaitu pengaturan jadwal mengajar Guru.

Tulisan berikut ini akan membahas tentang penguatan peran kepemimpinan kurikulum (*curriculum leadership*) oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai implementasi dari pelaksanaan kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*).

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan Instruksional

Memasuki dekade ke-3 abad ke-21 dunia pendidikan mengalami perubahan peran kepala sekolah secara dramatis. Dimulai sejak menjelang akhir abad ke-20 di mana isu kepemimpinan instruksional mulai berkembang, tuntutan terhadap kinerja tinggi kepala sekolah juga semakin menguat. Disisi lain penting sekali melakukan pengelolaan kurikulum yang *ajeg*, andal, sistemik, partisipatif, transparan, dan akuntabel (Wahyudin, 2019).

Peran kepala sekolah yang semula berfokus pada tata kelola administratif secara perlahan mulai bergeser ke peran-peran sentral sebagai pengawal implementasi kurikulum. Tetapi dimasa yang bersamaan, tetap saja peran kepala sekolah sebagai manajer, administrator, teladan, konselor, dan juga teman sejawat tidak bisa dihilangkan (Ng, 2013). Peran kepemimpinan sekolah sebagai faktor kunci dalam pencapaian kualitas pendidikan telah terbukti secara internasional (Bush, 2018).

Model kepemimpinan sekolah yang dipilihpun menentukan capaian prestasi sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Robinson (2009) membuktikan bahwa kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) memberikan dampak lima kali lebih besar dibandingkan kepemimpinan transformasi (*transformasional leadership*). Hal ini bisa terjadi karena kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan pembelajaran lebih terfokus pada peningkatan mutu sekolah yang mengakselerasi capaian prestasi belajar siswa, sedangkan mereka yang menerapkan kepemimpinan transformasi lebih terfokus pada hubungan antar individu kepala sekolah dengan guru (Bush, 2018). Seorang pemimpin sekolah yang

efektif akan memfasilitasi lingkungan belajar di sekolah agar siswa dapat belajar secara maksimal dan keterampilan mengajar guru dapat berkembang dengan baik (Jones & Ringler, 2020).

Untuk itulah maka, peran kepala sekolah telah bergeser menjadi pemimpin pembelajaran (*instructional leaders*). Pada Kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) kepala sekolah adalah pengawal untuk suksesnya proses belajar mengajar (Backor, 2015). Kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) maupun kepemimpinan distribusi (*distributed leadership*) sangat menentukan efektivitas kinerja kepala sekolah. Bahkan, semakin kepala sekolah mengawal implementasi pembelajaran, maka semakin bagus capaian hasil belajar siswa. Salah satu keterampilan kunci dari kepemimpinan pembelajaran adalah pelaksanaan supervise pembelajaran, di mana makna dari supervise pembelajaran ialah memastikan guru menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam seni belajar dan mengajar (Jones & Ringler, 2020).

Seorang kepala sekolah yang mengimplementasikan kepemimpinan instruksional adalah mereka yang memiliki peran sebagai pembangun budaya positif di sekolah. Kepala sekolah jenis ini membangun suasana akademik yang mendorong siswa memiliki target dan standar akademik yang tinggi. Para pemimpin instruksional memiliki kemampuan mendefinisikan arah dan dapat memotivasi orang lain untuk dapat bergabung untuk mencapai prestasi sesuai visi sekolah. Pemimpin jenis ini dapat memerankan dengan baik antara kepakaran dan kharismanya sehingga bisa mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Hallinger & Wang, 2015). Dalam upayanya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di antaranya (1) tantangan manajemen, (2) tantangan kompleksitas, dan (3) tantangan belajar (Brandon, et.al., 2018).

Setelah lebih dari 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, konsep dan implementasi kepemimpinan instruksional telah diterima secara global sebagai acuan normatif dan ekspektasi dari peran kepemimpinan sekolah. Sehingga hari ini kepemimpinan pembelajaran telah diterima sebagai salah satu elemen inti dalam kepemimpinan sekolah di seluruh dunia. Tentu saja dalam aplikasinya memiliki kekhasan sesuai dengan konteks dan keberagaman budaya setempat (Hallinger & Wang, 2015). Pada tahun 1980an Hallinger mengembangkan *Principal Instructional Management Rating Scale* (PIMRS) yang diambil dari 50 perilaku kepala sekolah (Neumerski, 2012). Kerangka kerja PIMRS terdiri dari 10 fungsi yang terbagi dalam tiga dimensi. Dimensi pertama terkait dengan fungsi kepala sekolah dalam mendefinisikan misi sekolah. Dimensi pertama ini terdiri dari dua fungsi kepala sekolah yaitu membuat kerangka tujuan sekolah dan mengkomunikasikan tujuan sekolah kepada pemangku kepentingan. Adapun dimensi kedua terkait dengan kemampuan mengelola program pembelajaran. Yang termasuk ke dalam dimensi ini ialah mengkoordinasikan kurikulum, melakukan supervise dan evaluasi pembelajaran, dan ketiga melakukan monitoring terhadap progres siswa. Dimensi ketiga terkait dengan pengembangan iklim belajar di sekolah. Dimensi ketiga terkait dengan fungsi kepala sekolah dalam memastikan waktu pembelajaran, menyediakan insentif untuk guru, memastikan adanya insentif untuk pembelajaran, melakukan pengembangan profesional, dan mengelola visibilitas proses pembelajaran dan interaksi dengan guru. maupun siswa (Hallinger & Wang, 2015).

B. Kepemimpinan Kurikulum

Kepemimpinan kurikulum memiliki dua tugas utama di sekolah, yaitu melakukan proses pengembangan kurikulum dan mengelola dan menentukan prioritas dalam melakukan proses pengembangan serta implementasi kurikulum. Seorang kurikulum manajer fokus pada menelaah bahan ajar, mengelola permasalahan kurikulum sehari-hari, termasuk mengatur jadwal pelaksanaannya. Seorang pemimpin kurikulum yang efektif memastikan arah dari kurikulum, menyelaraskan sumber daya manusia dengan bahan ajar, memberikan motivasi untuk peserta didik dan guru, dan memastikan adanya peningkatan mutu sekolah (Wiles, 2009).

Banyak penelitian yang menekankan pentingnya kepemimpinan kurikulum melalui kepastian pengajaran dan pembelajaran. Lemah dalam kepemimpinan ini mengakibatkan lemahnya motivasi sehingga menyebabkan kesalahan dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan kurikulum.

Kepemimpinan kurikulum juga memiliki kewenangan untuk menentukan muatan kurikulum sebuah sistem pendidikan (Stark, Briggs, & Rowland-Poplawski, 2002).

Kebutuhan terhadap kepemimpinan kurikulum saat ini semakin meningkat. Dengan adanya perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat sehingga berdampak pergeseran yang sangat dinamis dalam tatanan sosial kemasyarakatan semakin memerlukan posisi pemimpin kurikulum yang memiliki visi jauh ke depan serta menguasai kompetensi sehingga mampu mentranslasikan proyeksi masa depan ke dalam program kurikulum di sekolah. Mengingat pentingnya penguasaan TIK maka perlu beberapa strategi dalam menjalankan kepemimpinan di era sekarang (Aryawan, 2019). Hal tersebut mengakibatkan dalam implementasinya, seorang pemimpin kurikulum mampu merumuskan standar, prosedur, serta alat bantu lainnya yang memastikan terjadinya proses pengembangan dan implementasi kurikulum berfokus pada kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan tujuan yang ingin dicapai (Wiles, 2009). Seorang pemimpin kurikulum harus mampu melakukan pengembangan kurikulum yang meliputi kejelasan kriteria lulusan, penguasaan kompetensi dasar yang perlu dikuasai siswa, serta indikator pembelajaran yang selaras dengan kriteria lulusan. Selain itu, pemimpin kurikulum perlu memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dia harus memiliki kompetensi dalam melakukan supervise klinis, menentukan kriteria sekolah efektif, serta menjamin kualitas pembelajaran (Valentine & Prater, 2011).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi pustaka (*library research*) di mana peneliti melakukan pengumpulan sumber bahan rujukan dari buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung proses penelitian. Allen (2017) menyebutkan bahwa pada penelitian menggunakan metode *library research* peneliti memerlukan kehati-hatian untuk memeriksa informasi dan dokumen yang ditemukan termasuk waktu dan tempat ditemukannya informasi serta dokumen tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif satuan pendidikan, seorang kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam memastikan tingkat capaian kualitas lembaga yang dipimpinnya. Untuk itulah maka kapasitas seorang kepala sekolah akan sangat menentukan capaian tertinggi organisasi yang dikelolanya (Maxwell, 2007). Dari sinilah kemudian seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat menjadi bagian dari tim kepemimpinan sehingga kapasitas maksimal organisasi semakin meningkat (Maxwell J. C., 2013). Kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi terhadap kinerja kepemimpinan, komitmen guru, disiplin guru, dan budaya sekolah (Purwoko, 2018). Sejalan dengan ini, maka struktur organisasi kepemimpinan di sekolah biasanya dikelola dalam bentuk tim, yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil-wakilnya.

Keberadaan wakil kepala sekolah di setiap satuan pendidikan sangat beragam, tergantung pada banyaknya siswa yang terepresentasi di dalam jumlah rombongan belajar. Namun pun demikian, dalam praktiknya tidak ada ketentuan baku jumlah wakil kepala sekolah yang diperlukan dan untuk jabatan apa saja. Posisi yang selalu ada setiap penunjukan wakil kepala sekolah ialah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kondisi ini menjelaskan secara langsung kesadaran Lembaga penyelenggara satuan pendidikan tentang strategisnya peran kurikulum dalam memastikan kualitas lulusan dan kehendak untuk meningkatkan capaian kurikulum. Namun kehendak ini terkadang kandas dikarenakan tidak jelasnya peran yang diberikan sehingga kurang terarahnya aktivitas harian wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini.

Maka dapat disaksikan bahwa peran utama wakil kepala sekolah bidang kurikulum baru sebatas Menyusun jadwal harian, mengatur guru piket, mengumpulkan administrasi sekolah seperti silabus dan rencana pembelajaran, serta mencari pengganti di saat guru berhalangan hadir. Aktivitas tersebut tidaklah salah, hanya saja ada beberapa kegiatan penting yang sebenarnya dapat dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum sehingga peran kepemimpinan sekolah benar-benar dapat meningkatkan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan kurikulum selaras dengan target capaian prestasi sekolah maupun siswa (Valentine & Prater, 2011).

Dari sinilah maka perlu dipastikan adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi kepemimpinan pembelajaran antara kepala sekolah dengan wakil bidang kurikulum. Jika merujuk pada sepuluh fungsi manajemen pembelajaran yang dirumuskan oleh Hallinger & Wang (2015), setidaknya ada empat peran yang dapat dilakukan oleh wakil bidang kurikulum. Peran tersebut ialah:

- a. *Koordinator kurikulum.* Dalam peran ini seorang wakil kepala sekolah memastikan adanya keselarasan kurikulum baik secara horizontal maupun vertikal, baik dalam bidang studi yang sama maupun bidang studi yang berbeda. Misalnya saja dalam pembelajaran matematika tentang diagram, maka wakil kepala sekolah bidang kurikulum perlu memastikan pada guru yang mengajar apakah siswa telah mempelajari prasyarat pengetahuan sebelumnya, misalnya tentang tabel. Wakil bidang kurikulum perlu tahu kapan prasyarat tersebut diajarkan, di sinilah pentingnya mengecek struktur vertikal dari kurikulum matematika. Di sisi lain, wakil bidang kurikulum perlu mengecek sifat horizontal kurikulum dengan melihat adakah bidang studi lain yang memerlukan keterampilan siswa dalam membaca grafik dan diagram dan memastikan tema tersebut diajarkan setelah siswa benar-benar tentang menguasai grafik dan diagram dalam mata pelajaran matematika.
- b. *Supervise dan evaluasi pembelajaran.* Wakil bidang kurikulum selama ini memiliki tugas memastikan kehadiran guru di kelas, mengumpulkan silabus, dan mengkoordinasikan rencana pembelajaran. Peran ini perlu dinaikan sedikit lebih luas yaitu dengan tugas supervise klinis yaitu memastikan kehadiran guru di kelas memiliki kemampuan mengajar dengan baik dan apa yang diajarkan selaras dengan silabus maupun rencana pembelajaran. Sehingga proses penjaminan mutu pelaksanaan pembelajaran benar-benar terjadi. Selain itu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga perlu memastikan instrumen evaluasi pembelajaran benar-benar berkualitas dan dapat mengecek ketercapaian kompetensi minimum yang dipersyaratkan oleh kurikulum.
- c. *Monitoring kemajuan hasil belajar siswa.* Peran sentral wakil bidang kurikulum disini ialah membantu kepala sekolah dalam memastikan bahwa tingkat penguasaan akademik siswa sedang berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Konsep monitoring disini berbeda dengan diagnosis. Umumnya yang terjadi di sekolah-sekolah ialah proses diagnosis, di mana capaian hasil belajar siswa di cek hanya pada masa akhir semester melalui nilai rapor. Seharusnya yang dilakukan adalah memonitor progresnya. Untuk itu maka wakil bidang kurikulum perlu melakukan monitoring secara rutin terhadap capaian kompetensi dasar setiap bulan bahkan pekanan. Dengan cara demikian maka dapat teridentifikasi sejak dini masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga dapat diberikan bantuan yang relevan dengan segera.
- d. *Memastikan ketersediaan waktu pembelajaran yang cukup.* Ketersediaan hari efektif setiap tahun maupun setiap bulan selalu berbeda, adanya hari libur yang terkadang terpusat pada hari tertentu, misalnya hari Kamis, menyebabkan pembelajaran di hari tersebut (Kamis) menjadi berkurang, akibatnya mata pelajaran yang hanya diajarkan pada hari tersebut terancam tidak dapat tuntas. Dari sinilah peran wakil bidang kurikulum sangat diperlukan untuk melakukan harmonisasi ketercukupan waktu dari setiap kompetensi dan bidang studi.

Selain keempat peran di atas, peran-peran yang selama ini dilakukan seperti pengumpulan silabus dan rencana pembelajaran serta memastikan guru hadir tepat waktu tetap dijalankan. Hanya saja level pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Misalnya saja dalam hal pengumpulan silabus dan rencana

pembelajaran, wakil bidang kurikulum perlu memastikan *alignment* antara kompetensi dasar, indikator pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Hal juga yang dianggap penting ialah wakil bidang kurikulum dapat membantu kepala sekolahnya dalam hal penataan kelas, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, serta sumber belajar. Hal lain yang dapat dilakukan oleh wakil bidang kurikulum ialah melakukan kontrol area publik, penekanan disiplin pembelajaran, dan meniadakan dari potensi disrupsi dalam aktivitas belajar mengajar (Valentine & Prater, 2011).

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki peranan sangat strategis dalam tata kelola implementasi kurikulum. Peran penting yang selama ini belum terbiasa dilakukan dan perlu dimasukkan sebagai tugas wakil kepala bidang kurikulum ialah melakukan koordinasi pelaksanaan kurikulum, melaksanakan supervisi mutu pembelajaran dan evaluasinya, melakukan monitoring kemajuan hasil belajar siswa, memastikan ketercukupan waktu belajar, memastikan adanya keselarasan antara kompetensi dasar, indikator, serta pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dan melakukan kontrol dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini serta menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D., & Mooi, A. N. (2020). Principal leadership preparation towards high-performing school leadership in Malaysia. *Asian Education and Development Studies*, 9(4), 425-439.
- AITSL. (2014). *Australian Professional Standard for Principals and the leadership profiles*. Carlton South: AITSL.
- Allen, M. (2017). *The sage encyclopedia of communication research methods* (Vols. 1-4). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc doi: 10.4135/9781483381411 retrieved from <https://methods.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods/i7725.xml>
- Aryawan, I. W. (2019). Strategi kepemimpinan kepala sekolah di era revolusi industri 4.0 berlandaskan pada konsep panca upaya sandhi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(2), 132-141.
- Backor, K. T. (2015). Preparing principals as instructional leaders: perception of university faculty, expert principals, and expert teacher leaders. *NASSP Bulletin*, 99(2), 105-126.
- Barakat, M., Reames, E., & Kensler, L. A. (2019). Leadership Preparation Programs: Preparing Culturally Competent Educational Leaders. *Journal of Research on Leadership Education*, 212-235.
- Brandon, J., Hollweck, T., Donlevy, J. K., & Whalen, C. (2018). Teacher supervision and evaluation challenges: Canadian perspectives on overall instructional leadership. *Teachers and teaching*, 24(3), 263-280.
- Bush, T. (2018). Preparation and induction for school principals: Global Perspectives. *Management in Education*, 32(2), 66-71.
- Carlgrén, T. (2013). Communication, critical thinking, problem solving: a suggested course for all high school students in the 21st century. *Interchange*, 44, 63-81.

- Grissom, J. A., Hajime, M., & Woo, D. S. (2019). Principal Preparation Programs and Principal Outcomes. *Educational Administration Quarterly*, 73-115.
- Hallinger, P., & Wang, W.-C. (2015). *Assessing Instructional Leadership with the Principal Instructional Management Rating Scale*. Switzerland: Springer International Publishing. 1
- Jacobson, S. L., & Cypres, A. (2012). Improtant shift in curriculum of educational leadership preparation. *Journal of Research on Leadership Education*, 7(2), 217-236. 1
- Jang, H. (2015). Identifying 21st century STEM competencies using workplace data. *Journal of Science Education and Technology*, 25, 284-301. 1
- Jones, K. D., & Ringler, M. C. (2020). Preparing principal candidates to be instructional leader through virtual coaching preservice teachers. *Journal of Research on Leadership Education*, 15(2), 87-108.
- Koh, J. H., Chai, C. S., Wong, B., & Hong, H.-Y. (2015). *Design Thinking for Education: Conception and Application in Teaching and Learning*. Singapore: Springer Science Business Media.
- Liu, W.-C., & Low, E.-L. (2015). Editorial: teacher education for the 21st century. *Educational Research for Policy and Practice*, 14, 189-191.
- Maxwell, J. C. (2007). *The 21 Irrefutable laws of leadership*. Nashville: Thomas Nelson.
- 1 Maxwell, J. C. (2013). *5 Levels of Leadership*. New York: Center Street.
- National Policy Board for Educational Administration. (2015). *Professional Standards for Educational Leaders 2015*. Reston: Author. 1
- Neumerski, C. M. (2012). Rethinking instructional leadership, a review: what do we know about principal, teacher, and coach instructional leadership, and where should we go from here. *Educational Administration Quarterly*, 49(2), 310-347.
- Ng, S. W. (2013). Equipping aspiring principals for the principalship in Hong Kong. *Education Management Administration and Leadership*, 272-288.
- Peerone, F., & Tucker, P. D. (2019). Shifting profile of leadership preparation programs in the 21st century. *Education Administration Quarterly*, 55(2), 253-295.
- Purwoko, S. (2018). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, disiplin kerja guru, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru SMK. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(2), 150-162.
- Salgues, B. (2018). *Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools*. Hoboken: John Wiley & Sonc, Inc.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Stark, J. S., Briggs, C. L., & Rowland-Poplowski, J. (2002). Curriculum leadership roles of chairpersons in continuously planning departments. *Research in Higher Education*, 43(3), 329-356.
- Valentine, J. W., & Prater, M. (2011). Instructional, transformational, and managerial leadership and student achievement: high school principals make a difference. *NASSP Bulletin*, 95(1), 5-30.
- Wahyudin, Dinn. (2019). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Rosda Karya.
- Wiles, J. (2009). *Leading Curriculum Development*. Thousand Oaks: Corwin Press.
- World Economic Forum. (2020). *Schools of The Future: Defining new models of education for the fourth industrial revolution*. Genewa: World Economic Forum.

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

"Handbook on Promoting Social Justice in Education", Springer Science and Business Media LLC, 2020

Publication

3%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%